

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR
PERMOHONAN KEBERATAN SECARA PERSEORANGAN

KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - PERSEORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) tahun

Yth. Bupati Malang
Up. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Asset Kabupaten Malang
di Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP : NPWP
Alamat : Jl. No. Telp. RT. ... RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
No. SPPT/SKPD PBB *) : Tahun Pajak
PBB Terhutang : Rp. (.....)
Tanggal Terima SPPT/SKPD PBB *) :

Dengan ini mengajukan keberatan atas Pajak Terhutang pada SPPT/SKPD PBB *) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Luas Objek Bumi /bangunan *) pada SPPT/SKPD PBB *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya
Luas sebenarnya adalah: bumiM² bangunanM²

☐
2. NJOP bumi/bangunan *) pada SPPT/SKPD PBB *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya
NJOP sebenarnya adalah: bumi Rp. /M², bangunan Rp. /M².

☐
3. Kesalahan penetapan/pengenaan: belum memperoleh NJOPTKP/salah NJKP *)

☐
4. Objek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB, karena

☐
5.

☐

- Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun adalah sebagai berikut:
- 1. Bumi :M2 X Rp. / M2 = Rp.
 - 2. Bangunan :M2 X Rp. / M2 = Rp.
 - 3. NJOP : (1+2) = Rp.
 - 4. NJOPTKP : = Rp.
 - 5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) = Rp.
 - 6. PBB terhutang (..... X Rp.)
(.....)

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- 1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang lain/pihak lain). ☐
- 2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. ☐
- 3. Fotokopi SPPT/SKPD PBB *) tahun pajak yang bersangkutan. ☐
- 4. SPOP dan lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani. ☐
- 5. Fotokopi bukti pembayaran PBB (STTS) tahun terakhir. ☐
- 6. Fotokopi surat tanah dan/atau bangunan/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah mengenai pemilikan atas tanah dan/atau bangunan. ☐
- 7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertipikat). ☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....,

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA